

# Komparasi Ketimpangan Pembangunan Antara Provinsi Sumatera Utara Dan Provinsi Sumatera Barat

Novita Purba Tambak<sup>1</sup>, Mike Triani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, Indonesia.

\*Korespondensi: [novitapurba16112000@gmail.com](mailto:novitapurba16112000@gmail.com), [miketriani@fe.unp.ac.id](mailto:miketriani@fe.unp.ac.id)

## Info Artikel

### Diterima:

08 Agustus 2025

### Disetujui:

15 Agustus 2025

### Terbit daring:

17 Agustus 2025

### DOI: -

## Sitasi:

Tambak, N.P. & Trianu, M. (2025). Komparasi Ketimpangan Pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat

## Abstract:

The problem of development inequality is a crucial issue in Indonesia. Development inequality is caused by differences in geographical conditions of a region such as regional characteristics, natural resource potential, human resources and uneven investment levels between regions. North Sumatra and West Sumatra are in one region, namely Sumatra Island, which is in the same national fiscal system but has a contrasting pattern of inequality. This study specifically discusses the comparison of regional inequality levels measured using the Williamson Index between North Sumatra and West Sumatra Provinces based on Regency/City data by looking at the influence and how large the comparison of Regional Expenditure, TPAK, Infrastructure, HDI and Economic Growth of the two regions. This study uses statistical analysis with a difference test (t-Test) using BPS data from 2019-2023. The results show that there are significant differences in Regional Expenditure, TPAK, Infrastructure, HDI and Economic Growth between North Sumatra and West Sumatra and significantly affect development inequality.

**Keywords:** Williamson Index, Regional Expenditure, TPAK, HDI, Infrastructure, Economic Growth

## Abstrak:

Permasalahan ketimpangan pembangunan merupakan persoalan yang krusial di Indonesia. Ketimpangan pembangunan diakibatkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis dari suatu wilayah seperti karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan tingkat investasi yang tidak merata antar daerah. Sumatera Utara dan Sumatera Barat berada dalam suatu wilayah yaitu Pulau Sumatera yang berada dalam sistem Fiskal nasional yang sama namun memiliki pola ketimpangan yang kontras. Penelitian ini secara khusus membahas tentang perbandingan tingkat ketimpangan wilayah yang diukur menggunakan Indeks Williamson antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat berdasarkan data Kabupaten/kota dengan melihat pengaruh serta seberapa besar perbandingan Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi dari kedua wilayah. Penelitian ini menggunakan analisis statistik dengan uji beda (t-Test) dengan menggunakan data BPS tahun 2019-2023. Hasil menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan dari Belanja Daerah, TPAK, Infrastruktur, IPM dan Pertumbuhan Ekonomi antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat serta secara signifikan mempengaruhi ketimpangan pembangunan.

**Kata Kunci:** Indeks Williamson, Belanja Daerah, TPAK, IPM, Infrastruktur, Pertumbuhan Ekonomi

Kode Klasifikasi JEL: H76, O47, O18

## PENDAHULUAN

Isu kesenjangan pembangunan merupakan tantangan lama yang dihadapi oleh hampir seluruh negara, baik di level kawasan kecil, kabupaten/kota, provinsi, gugusan pulau, hingga skala global (Sahban & Se, 2018). Di Indonesia, ketidakseimbangan pembangunan terjadi akibat sistem pemerintahan yang pada awalnya bersifat sentralistik. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 mengenai Dasar-Dasar Pemerintahan Daerah, struktur pemerintahan Indonesia mulai beralih menuju sistem yang lebih terdesentralisasi. Ketimpangan pembangunan wilayah di Sumatera Utara diakibatkan oleh dominasinya pembangunan di wilayah perkotaan sementara itu Sumatera Barat memperlihatkan pola pemerataan yang lebih menyebar antar kabupaten dan kotanya,

meskipun hingga saat ini ketimpangan wilayah di daerah pesisir dan pedalaman masih menjadi persoalan (Rani et al., 2021). Perbedaan klasifikasi ekonomi kedua wilayah ini menciptakan peluang analisis komparatif terhadap bagaimana komponen seperti Belanja Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Infrastruktur jalan (dalam kondisi baik), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi memberikan pengaruh terhadap disparitas pembangunan pada wilayah masing-masing. Tingkat ketimpangan dapat diukur melalui hasil akhir dari Indeks Williamson. Semakin tinggi nilai indeks tersebut, maka semakin tinggi pula disparitas pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin rendah nilai indeks, maka menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah semakin kecil.

**Tabel 1. Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Sumatera Utara		Sumatera Barat	
	IW	Kategori	IW	Kategori
<b>2019</b>	0.5757	Ketimpangan Sedang	0.2666	Ketimpangan Rendah
<b>2020</b>	0.5639	Ketimpangan Sedang	0.3020	Ketimpangan Rendah
<b>2021</b>	0.5565	Ketimpangan Sedang	0.3053	Ketimpangan Rendah
<b>2022</b>	0.5603	Ketimpangan Sedang	0.3076	Ketimpangan Rendah
<b>2023</b>	0.5762	Ketimpangan Sedang	0.3105	Ketimpangan Rendah

*Sumber : data Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan tabel diatas menampilkan data Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat dari tahun 2019 hingga 2023. Indeks Williamson Sumatera Utara menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada Tabel 1.1 nilai indeks tertinggi Sumatera Utara tampak pada tahun 2023 dengan nilai 0.5762 sedangkan nilai indeks terendah Sumatera Utara dengan nilai 0.5565 terjadi pada tahun 2021. Data Indeks Sumatera Barat dengan nilai tertinggi 0.3105 terjadi pada tahun 2023 sedangkan nilai indeks terendah Sumatera Barat terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 0.2666.

Perbandingan antara Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat memperlihatkan bahwa Sumatera Barat memiliki nilai indeks yang lebih rendah daripada Sumatera Utara selama periode 2019 hingga 2023. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan di Sumatera Utara relatif tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan sementara pemerataan pembangunan di Sumatera Barat lebih merata. Nilai indeks yang lebih tinggi di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perbedaan tingkat pembangunan, infrastruktur dan sumber daya manusia.

Dalam rangka menekan ketimpangan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan sejumlah kebijakan afirmatif. Pertumbuhan ekonomi yang bersifat inklusif menjadi syarat utama untuk mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah tersebut. Target peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang melampaui laju pertumbuhan penduduk diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan

masyarakat secara adil (Sianipar, 2015 dalam Harahap et al., 2024). Salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah adalah pengeluaran daerah. Pengelolaan belanja publik yang efektif dan efisien diyakini dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat serta menekan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Ketimpangan dalam pembangunan memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan di sektor ketenagakerjaan. Distribusi pembangunan ekonomi yang merata sangat bergantung pada kontribusi sumber daya manusia dalam proses pengelolaannya, mengingat manusia berperan sebagai tenaga kerja, masukan utama pembangunan, sekaligus konsumen dari hasil pembangunan itu sendiri (Darzal, 2016). Peningkatan angka partisipasi angkatan kerja maupun produktivitas tenaga kerja dapat memberikan peluang terhadap peningkatan output. Dalam konteks ini, output dimaknai sebagai pendapatan per kapita yang diperoleh oleh para pekerja. Semakin tinggi pendapatan atau upah yang diterima, maka semakin besar pula daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat adalah dua wilayah yang memiliki karakteristik wilayah, sosial dan ekonomi yang berbeda. Dibandingkan dengan Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara cenderung memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi, sehingga hal tersebut mengakibatkan adanya struktur ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat dengan basis pertanian dan budaya local yang kuat. Perbedaan karakteristik kedua wilayah ini mempengaruhi distribusi pembangunan masing-masing wilayah, sehingga Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Barat menarik untuk diteliti secara komparatif.

Penelitian ini secara khusus membahas tentang perbandingan tingkat ketimpangan wilayah antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat berdasarkan data Kabupaten/kota dari kedua wilayah tersebut, serta menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan. Berdasarkan berbagai indikator pembangunan yang relevan, serta merujuk pada latar belakang permasalahan dan dinamika yang terjadi di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh variabel-variabel seperti Belanja Daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), ketersediaan Infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan ketimpangan pembangunan antara kedua provinsi tersebut secara lebih komprehensif maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Komparasi Ketimpangan Pembangunan Antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan, khususnya terkait ketimpangan pembangunan antarwilayah. Sementara itu, pendekatan induktif digunakan karena analisis dalam penelitian ini bertujuan menarik kesimpulan dari pola-pola empiris yang ditemukan berdasarkan data yang tersedia.

Lokasi penelitian mencakup dua provinsi di wilayah Sumatera, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Pemilihan kedua wilayah ini didasarkan pada perbedaan karakteristik wilayah serta tren ketimpangan pembangunan yang cukup signifikan. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023, agar dapat memperoleh data deret waktu yang memadai untuk dianalisis secara komprehensif.

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber resmi yang telah dipublikasikan, khususnya dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data sekunder merupakan jenis data yang tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti, melainkan oleh pihak lain, namun tetap relevan dan mendukung fokus kajian yang diteliti. Jenis data sekunder yang digunakan antara lain data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja daerah, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan indikator pembangunan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dan studi kepustakaan. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data statistik dan laporan yang telah diterbitkan oleh instansi resmi, sedangkan studi kepustakaan digunakan untuk menelaah teori-teori, hasil penelitian sebelumnya, dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan akurat dalam menjelaskan pengaruh berbagai faktor terhadap ketimpangan pembangunan di kedua provinsi yang diteliti. Teknik analisis yang di gunakan dalam studi ini adalah uji beda (Independent sample t-Test). Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengukur perbandingan ketimpangan antara Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Penelitian ini mencakup dua provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat selama periode 2019–2023. Kedua provinsi ini memiliki karakteristik geografis dan demografis yang berbeda namun saling berbatasan secara langsung. Sumatera Utara memiliki luas wilayah 72.461 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk mencapai 15,39 juta jiwa, terdiri atas 25 kabupaten dan 5 kota. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran Selat Malaka menjadikannya berpotensi besar dalam perdagangan dan konektivitas antarnegara. Sementara itu, Sumatera Barat memiliki luas daratan 42.297,30 km<sup>2</sup> dan luas perairan 186.580 km<sup>2</sup>. Provinsi ini dilalui garis Khatulistiwa dan beriklim tropis dengan suhu rata-rata 25,78°C. Jumlah penduduknya tercatat sebanyak 5,76 juta jiwa yang tersebar di 12 kabupaten dan 7 kota. Kedua provinsi memiliki posisi geografis yang penting dan potensi pembangunan yang berbeda, menjadikannya relevan untuk dianalisis dalam konteks ketimpangan pembangunan wilayah.:

### Teknik Analisis

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data panel, yaitu gabungan antara data deret waktu dan data antarwilayah. Analisis dilakukan dengan memanfaatkan data dari seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi untuk melihat ketimpangan pembangunan secara lebih rinci. Penelitian ini bertujuan membandingkan ketimpangan pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat dalam periode tertentu.

Penelitian ini menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan pada level kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat selama periode 2019 hingga 2023. Rata-rata nilai ketimpangan pembangunan pada kedua provinsi tersebut ditampilkan dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Indeks Williamson Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2023**

Tahun	Sumatera Utara		Sumatera Barat	
	IW	Kategori	IW	Kategori
<b>2019</b>	0.5757	Ketimpangan Sedang	0.2666	Ketimpangan Rendah
<b>2020</b>	0.5639	Ketimpangan Sedang	0.3020	Ketimpangan Rendah
<b>2021</b>	0.5565	Ketimpangan Sedang	0.3053	Ketimpangan Rendah
<b>2022</b>	0.5603	Ketimpangan Sedang	0.3076	Ketimpangan Rendah
<b>2023</b>	0.5762	Ketimpangan Sedang	0.3105	Ketimpangan Rendah

Sumber : data Badan Pusat Statistik (BPS)

Pada tabel diatas terlihat perbandingan dari Indeks Williamson antara provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat selama periode 2019-2023. Terlihat pada tabel tersebut bahwa Indeks Williamson Sumatera Utara konsisten masuk dalam kategori Ketimpangan Sedang. Tampak bahwa tahun 2019-2021 Indeks Williamson di Sumatera Utara mengalami penurunan yang kecil namun konsisten. Terlihat pada tahun 2022-2023 Indeks Williamson di Sumatera Utara kembali mengalami kenaikan, yang menggambarkan bahwa ketimpangan pembangunan pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan.

Ketimpangan/disparitas pembangunan di Sumatera Utara menunjukkan disparitas antar kabupaten/kota di Sumatera Utara relatif kurang berkembang. Fluktuasi ini memperlihatkan meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan dari 0.5639 menjadi 0.5556, pada tahun berikutnya kembali mengalami peningkatan, sehingga hal tersebut menjelaskan tidak ada perubahan ketimpangan yang relevan.

Pada tabel tersebut menunjukkan Indeks Williamson di Sumatera Barat berada pada kategori ketimpangan rendah selama periode 2019-2023. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Indeks Williamson di Sumatera Barat menunjukkan tren yang lebih rendah dan stabil di dibandingkan dengan Indeks Williamson di Sumatera Utara. Perbedaan antara Indeks Williamson Sumatera Utara dan Sumatera Barat menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Sumatera Barat cenderung lebih baik dibandingkan dengan Sumatera Utara.

**Tabel 1. Hasil Uji Beda (t-Test)**

Y	df	Value	Probability
<b>Belanja daerah</b>	258	3.5354	0.0005
<b>TPAK</b>	258	3.535401	0.0005
<b>Infrastruktur</b>	258	-4.39083	0.0000
<b>IPM</b>	258	-4.35464	0.0000
<b>Pertumbuhan Ekonomi</b>	258	0.828887	0.4091

Sumber: Hasil olahan data eviews

Selanjutnya, hasil uji beda dua sampel independen (independent sample t-test) terhadap variabel Belanja Daerah, yang merepresentasikan rasio belanja pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Rata-rata Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Utara tercatat sebesar 17,46334, sedangkan di Sumatera Barat sebesar 14,29963. Uji t menghasilkan nilai t-hitung sebesar 2,19 dengan p-value 0,0294, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% ( $\alpha = 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio belanja daerah terhadap PDRB antara kedua provinsi.

Analisis terhadap variabel TPAK, yang menggambarkan rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), juga menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat selama lima tahun terakhir. Nilai rata-rata TPAK di wilayah kabupaten/kota Sumatera Utara sebesar 72,93885, sedangkan di Sumatera Barat sebesar 69,70000. Uji statistik menghasilkan nilai t sebesar 3,5354 dengan p-value 0,0005, jauh di bawah batas signifikansi 0,05. Hal ini menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik dalam rata-rata TPAK antara kedua provinsi tersebut.

Pada variabel Infrastruktur, yang menunjukkan rasio panjang jalan dalam kondisi baik, juga ditemukan perbedaan yang signifikan. Rata-rata nilai Infrastruktur untuk kabupaten/kota di Sumatera Utara adalah 3,634476, sedangkan di Sumatera Barat sebesar 9,160526. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung sebesar -4,390287 dengan p-value 0,0000, yang jauh di bawah ambang batas signifikansi. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang sangat signifikan dalam ketersediaan infrastruktur jalan yang layak antara kedua provinsi.

Hasil pengujian terhadap variabel IPM, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), juga mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara kedua provinsi. Nilai t-hitung sebesar 3,535401 dengan p-value 0,0005 mendukung kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nyata dalam rata-rata IPM kabupaten/kota di Sumatera Utara (72,93885) dan Sumatera Barat (69,78947).

Berbeda dengan variabel sebelumnya, hasil uji beda terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi yang merepresentasikan tingkat pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nilai t-hitung sebesar 0,828887 dengan p-value sebesar 0,4091, p-value di atas 0,05, memperkuat kesimpulan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi antara kedua provinsi. Secara deskriptif, rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Sumatera Utara tercatat sebesar 3,32848, sedikit lebih tinggi dibandingkan Sumatera Barat yang sebesar 3,12895, namun selisih tersebut tidak cukup kuat untuk dinyatakan berbeda secara statistik.

## SIMPULAN

Hasil uji beda (t-test) menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Belanja daerah dan panjang jalan—termasuk jalan dalam kondisi baik—menunjukkan perbedaan signifikan, yang mencerminkan ketimpangan dalam kapasitas fiskal dan infrastruktur antarwilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga berbeda signifikan, menandakan ketimpangan dalam kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi relatif seragam di kedua provinsi, namun keseragaman ini tidak menjamin pemerataan pembangunan karena masih terdapat disparitas dalam variabel-variabel penting lainnya. Dengan demikian, ketimpangan wilayah lebih dipengaruhi oleh distribusi pembangunan daripada laju pertumbuhan ekonomi semata.

Pemerintah daerah perlu mengevaluasi distribusi belanja agar lebih berpihak pada wilayah tertinggal serta fokus membangun infrastruktur jalan di daerah dengan akses rendah. Peningkatan IPM juga sebaiknya diprioritaskan di wilayah dengan kualitas SDM rendah, khususnya dalam pendidikan dan kesehatan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kemiskinan, pengangguran, dan akses layanan publik, serta menggunakan pendekatan spasial atau regresi panel untuk hasil yang lebih menyeluruh.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adisasmita, R. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu.
- Alfiansyah, H., & Budyanra, B. (2019). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013–2017. Seminar Nasional Official Statistics, 2019(1), 424–429.
- Alfurqani, Z. H., Widiarsih, D., & Algusri, J. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Investasi terhadap Ketimpangan Pembangunan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. *ECOUNTBIS: Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 295–307.
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729–738.
- Ananta, A., et al. (2013). Demography of Indonesia's Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies.
- Anwar, A. A., Rorong, I. P. F., & Tolosang, K. D. (2023). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(6), 85–96.
- Aprilia, S., & Ananda, R. (2018). Pengaruh Kredit Rumah Tangga terhadap Pengeluaran Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 15(2), 101–110.
- Arini Sita, P. R. (2017). Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen Bisnis*, 2(2), 180–198.
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Ginanjar, R. A. F. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Provinsi di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16.
- Azizi, A. (2020). Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(1), 1–12.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2012). Indikator Ketenagakerjaan Indonesia. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Panjang Jalan Antar Provinsi di Indonesia. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2023). Indeks Pembangunan Manusia Indonesia 2023. Jakarta: BPS.
- Bachtiar, H. (2015). Pembangunan Wilayah Berbasis Potensi Lokal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 6(2), 110–123.
- Booth, A. (2000). Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 36(1), 73–104.

- Borjas, G. J. (2013). *Labor Economics* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Darzal, D. (2016). Analisis Disparitas Pendapatan dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(2), 131–142.
- Didia, K. A. (2016). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Kedungsepur. *Economic Development Analysis Journal*, 5(1), 101–108.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (Ed. 10). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafidz, M. (2019). Ketimpangan Wilayah dan Infrastruktur Dasar. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 19(2), 93–102.
- Handayani, D. V. (2025). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Belanja Daerah terhadap Ketimpangan Pembangunan Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015–2022. *Jurnal Ilmu dan Budaya*, 25(1), 186–192.
- Harahap, E. S., Simanjuntak, L. F., & Khaira, I. (2024). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Utara. *Economy and Currency Study*, 6(2).
- Harlina, H., & Manduapessy, R. L. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(2), 131–156.
- Hasyim, A. I. (2016). *Ekonomi Makro*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilham, & Evita. (2017). Analisis Ketimpangan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2011–2015. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(4), 1–12.
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2017). Analisis Pengaruh Infrastruktur terhadap Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Provinsi Aceh. *Economic and Finance Review*, 21(1), 75–84.
- Janah, M. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat PDRB Perkapita, Indeks Pembangunan Manusia, dan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia Tahun 2019–2021. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4), 23–43.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kamaruddin, R., & Alam, M. (2018). Inklusi Keuangan dan Pemerataan Ekonomi Wilayah. *Jurnal Keuangan dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 33–45.
- Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kusumawati, D. (2018). Struktur Ketenagakerjaan dan Kualitas Tenaga Kerja Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145–158.
- Muqorrobin, M. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3), 210–220.
- Nugroho, P., & Fauzi, A. (2020). Urbanisasi dan Struktur Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 21(1), 34–48.
- Paddu, A. H. (2024). *Ekonomi Indonesia Kini dan Esok*. Makassar: Unhas Press.

- Pamiati, B. A., & Woyanti, N. (2021). Analisis Pengaruh Populasi, Pertumbuhan Ekonomi, TPAK dan IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan di Kawasan Barlingmascakeb 2013–2019. *BISECER (Business Economic Entrepreneurship)*, 4(1), 17–28.
- Rahardjo, R., & Lestari, D. (2020). Pemerataan Infrastruktur dan Ketimpangan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(1), 21–32.
- Ramadhan, P. R., & Umiyati, E. (2021). Analisis Belanja Daerah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya di Kabupaten Bungo. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 135–146.
- Rani, S., Yulita, N., & Harun, R. (2021). Disparitas Wilayah dan Pembangunan Inklusif di Sumatera Barat. *Jurnal Perencanaan Wilayah*, 19(2), 101–112.
- Rudi, P., & Sutjipto, N. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan PAD. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(3), 1–17.
- Sahban, M. A., & Se, M. M. (2018). Kolaborasi Pembangunan Ekonomi di Negara Berkembang (Vol. 1). Makassar: Sah Media.
- Safitri, N. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(1), 77–90.
- Sianipar, D. (2015). Peningkatan PDRB dan Pemerataan Ekonomi. Dalam Harahap et al. (2024). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Utara. *Economy and Currency Study*, 6(2).
- Simanjuntak, P. J. (1985). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Baduose Media.
- Sjafrizal. (2012). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sovita, Y. D. R. I. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Pulau Jawa. *Jurnal Menara Ekonomi*, 2(4), 45–56.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2017). *Makroekonomi: Teori Pengantar (Edisi Ketiga)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukwika, T. (2018). Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 6(2), 115–130.
- Swasono, Y. (1983). *Metode Perencanaan Tenaga Kerja: Tingkat Nasional, Regional dan Perusahaan*. BPFPE.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi (Ed. 11)*. Jakarta: Erlangga.
- Wanti, O., Zulgani, Z., & Rosmeli, R. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 6(3), 81–93.
- Wibowo, A., & Hidayat, T. (2020). IPM dan Kesenjangan Wilayah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(1), 55–67.
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. *Cakrawala - Jurnal Humaniora*, 17(2), 207–215.

- Wididarma, K., & Jember, M. (2021). Pengaruh IPM dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(7), 2982–3010.
- World Bank. (2016). *Ketimpangan yang Semakin Lebar*. Jakarta: World Bank.
- Yuliani, D., & Sari, M. (2018). Ketimpangan Infrastruktur Jalan Antarwilayah. *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, 12(1), 41–52.
- Zasriati, M. (2022). Analisis Ketimpangan Pembangunan di Indonesia Tahun 2010–2020. *Al-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 119–131.
- Zega, Y. T., Mursalin, D., & Yudhistira, I. P. (2022). Ketimpangan Pembangunan dan Konvergensi Pendapatan Antarkabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 188–198.
- Zhang, W., Li, H., & Chen, Y. (2024). Formal Credit Access and Household Welfare: Evidence from Developing Countries. *Journal of Development Economics*, 156, 102948.9